

Judul : Soal Transmigrasi ke IKN, Demokrat Ingatkan Jokowi
Tanggal : Senin, 27 Januari 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

POLITIKA

Soal Transmigrasi ke IKN, Demokrat Ingatkan Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak terburu-buru dalam membuat keputusan, terutama memindahkan sebagian masyarakat di Pulau Jawa ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Sebab, transmigrasi di Kaltim sebelumnya juga masih menyisakan masalah.



Irwan Fecho

Anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho mengatakan, presiden seharusnya tidak terburu-buru memindahkan masyarakat ke lokasi IKN, walau dengan alasan pemerataan penduduk," ujarnya kepada **INDOPOS** saat dihubungi, Minggu (26/1).

Anggota Komisi V DPR RI itu menjelaskan, transmigrasi yang sebelumnya dilakukan di era Orde Baru masih menyisakan banyak masalah hingga hari ini. Seperti misalnya, banyak masyarakat lokal yang belum sejahtera termasuk juga belum memiliki tanah dan tempat tinggal. "Harusnya ini yang diperhatikan oleh Jokowi termasuk pemerataan infrastruktur dan ekonomi," pinta Irwan.

Menurut legislator Dapil (Daerah Pemilihan) Kaltim itu, tanah para transmigran yang dulu diberikan berada dalam kawasan hutan, mereka memang memiliki sertifikat, tetapi lahannya tidak ada. Jadi sudah seharusnya pemerintah pusat menyelesaikan terlebih dahulu masalah ini daripada kemudian mengadakan program transmigrasi baru.

"Itu (transmigrasi baru, red) hanya akan melahirkan kesengsaraan baru dan potensi konflik baru. Beda halnya jika masyarakat Kaltim kehidupannya sudah berkeadilan dan sejahtera, opsi yang disampaikan Jokowi itu bisa dibuka," imbuhnya.

Diketahui, Presiden Jokowi menayangkan sebuah video Ibu Kota baru di Kalimantan Timur yang akan menggantikan DKI Jakarta. Hal itu dilakukan dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1) malam.

Presiden Jokowi mengatakan, baru pertama kalinya video tersebut ditayangkan dalam hajatan partai politik. "Saya ingin nanti bisa dilihat dalam tayangan mengenai ibu kota kita yang baru. Ini pertama kali tayangan kita sampaikan dalam forum politik, forum partai, pertama kali ini," ujarnya saat melayangkan sambutan.

Jokowi mengatakan, dirinya ingin pindah ibu kota bukan hanya berpindah lokasi. Melainkan ingin mengubah sistem yang saat ini sudah terbangun lama. "Pindah ibu kota itu bukan hanya pindah lokasi, pindah istana, pindah kementerian, bukan. Kita ingin pindah kultur kerja kita," katanya.

Dia ingin membangun system, sehingga ada kecepatan dalam memutuskan perubahan zaman yang ada. "Kita ingin bangun kultur kerja, sistem kerja yang baik jadi yang kita instal dulu itu sistemnya, baru orangnya. tapi ini pekerjaan besar," ungkapnya.

Nantinya jika Indonesia punya ibu kota baru, maka akan seperti Amerika Serikat yang ada New York, dan Washington DC. Kemudian Australia mempunyai Sydney dan Canberra. Ibu kota baru juga nantinya akan mengusung sebuah konsep kota yang sangat hijau atau *green city*. Kata Jokowi, ibu kota baru adalah kota yang cerdas karena sistemnya dibangun dengan konsep *smart city*.

"Itu sebuah kota yang benar-benar kita harapkan zero emisi karena yang kita gunakan adalah kendaraan listrik dan otomatis tanpa supir, baik kendaraan umum maupun pribadi," ungkapnya. (aen)